

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Paraguay mempunyai warisan konflik yang kompleks. Presiden Raul Cubas Grau yang baru menjabat selama 7 bulan sejak 15 Agustus 1998 terpaksa mengundurkan diri pada tanggal 28 Maret 1999 untuk memenuhi tuntutan rakyat yang menuduhnya terlibat pembunuhan Wakil Presiden Luis Maria Argana pada tanggal 23 Maret 1999. Suasana yang tidak menentu ini mendorong anggota kongres mengadakan sidang istimewa pada tanggal 29 Maret 1999 untuk menetapkan Ketua Kongres Luis Angel Gonzales Macchi yang juga merupakan lawan politik Raul Cubas Grau sebagai Presiden baru. Gerakan massa menjadi kekuatan pendorong bagi Gonzales Macchi dalam menjalankan pemerintahan. Tetapi belakangan timbul berbagai tekanan dari berbagai kelompok politik yang menghendaki adanya perubahan dalam struktur pemerintahan dan Presiden Gonzales Macchi dianggap gagal melakukan terobosan penting dalam bidang politik dan ekonomi. Sebaliknya kekacauan dalam bidang politik yang terus berlanjut berjalan secara paralel dengan krisis ekonomi.

Upaya Presiden Gonzales Macchi untuk mengekstradisi kembali pelarian buronan Paraguay ke negara-negara tetangganya telah menyita perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan di sektor sosial ekonomi, ditambah kebijakan privatisasi yang dikeluarkan oleh Presiden Gonzales Macchi mendapat reaksi keras dari masyarakat. Rakyat setempat menilai privatisasi akan

memperburuk ekonomi negara dan semakin menambah pengangguran. Maka dengan penjelasan di atas penulis mengangkat judul “Krisis Legitimasi Presiden Luis Angel Gonzales Macchi di Paraguay”.

B. Latar Belakang Masalah

Paraguay merupakan sebuah negara di Amerika Latin yang merdeka pada tanggal 14 Mei 1811 setelah memproklamkan kemerdekaannya dari penjajahan Portugis. Pada abad ke-16, para penjajah Spanyol datang ke kawasan Paraguay dan selama lebih dari dua abad kawasan itu menjadi koloni Spanyol. Setelah merdeka pada 14 Mei 1811, Paraguay terus dilanda konflik internal akibat terjadinya beberapa kali kudeta. Pemerintahan yang terbentuk hasil kudeta itu juga selalu memunculkan karakter diktatorisme. Barulah pada tahun 1989, demokrasi dipulihkan di Paraguay, dimana rakyat negara itu berhasil mengadakan pemilu pertama dalam sejarah untuk memilih Presiden. Tetapi stabilitas politik belum juga tercapai.¹

Dilihat dari sejarahnya, Paraguay tidak pernah lepas dari konflik yang berkepanjangan. Sebagian perekonomian negeri ini dikuasai oleh penyelundup yang memasukkan rokok, alat elektronik dan pakaian secara ilegal. Para penyelundup bergerak leluasa karena otoritas pemerintahan kurang berfungsi dalam menata perekonomian.²

¹ “Paraguay Merdeka”, dalam <http://www.nedherland.com>, diakses tanggal 20 November 2008.

² “Paraguay dalam Keadaan Darurat”, dalam <http://www.kapanlagi.com>, diakses tanggal 25 Oktober 2008.

Presiden Luis Angel Gonzales Macchi diangkat melalui sidang Luar Biasa Konggres pada tanggal 29 Maret 1999, sebagai presiden transisi menggantikan Raul Cubas Grau yang melarikan diri ke Brasil terkait dengan terbunuhnya Wapres Luis Maria Argana tanggal 23 Maret 1999. Sidang Luar Biasa Konggres tersebut diadakan untuk menghindari kevakuman jabatan Presiden, sedangkan untuk jabatan Wakil Presiden akan diproses dalam pemilihan khusus pada tanggal 13 Agustus 2000.³ Macchi tidak mengalami permasalahan pada awal pemerintahannya yang ditunjukkan dengan adanya sikap masyarakat yang mendukung Macchi untuk menjabat sebagai presiden di Paraguay.

Saat itu kondisi dalam negeri Paraguay senantiasa dibayangi oleh ketidakpastian. Kemudian Presiden Luis Gonzales membentuk Kabinet Kesatuan Nasional dengan melibatkan empat kekuatan politik yang ada yaitu Partai Colorado, Partai Liberal Autentica, Partai Encuentro Nacional, dan Partai Democrata Del Pueblo. Pada awalnya kabinet ini mendapat dukungan dari semua pihak, namun belakangan timbul berbagai tekanan dari berbagai kelompok politik yang menghendaki adanya perubahan dalam struktur pemerintahan. Dan juga adanya berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat memperkuat seruan pengunduran diri Gonzales Macchi dan pengunduran diri Miguel Abdon Saguier sebagai menteri luar negeri yang selanjutnya menjadi titik pangkal keretakan Kabinet Kesatuan Nasional.⁴

³ Laporan tahunan Paraguay Kedubes RI 1999-2000, hal.7-10.

⁴ “Bahaya Kekerasan Masih Menghancam Paraguay”, dalam <http://www.rnl/ranesi.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2008.

Presiden Macchi yang pada awalnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan rasa simpatik masyarakat saat Macchi menjabat sebagai presiden Paraguay. Saat Macchi resmi diangkat untuk menjadi presiden Paraguay, tidak ada kelompok atau masyarakat yang melakukan demonstrasi. Hal itu menunjukkan bahwa pada awal Macchi diangkat menjadi presiden Paraguay memang masyarakat mendukungnya mengingat kevakuman kursi kepresidenan harus segera diisi dan Macchi adalah orang yang secara prosedural pemerintahan adalah orang yang memang selayaknya menjadi presiden. Hal itu dikarenakan sesuai dengan aturan pemerintahan yang ada di Paraguay bahwa apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan maka yang akan menggantikan tugasnya adalah ketua kongres Paraguay dengan kesepakatan anggota kongres melalui sidang luar biasa. Saat itu sidang luar biasa juga mendukung keberadaan Macchi untuk menjadi presiden Paraguay.

Namun, belakangan Macchi dikritik dan mengalami penurunan legitimasi. Indikator dari adanya penurunan legitimasi pada pemerintahan Macchi adalah banyaknya kritikan dari masyarakat Paraguay. Kritikan tersebut diwujudkan dalam bentuk demonstrasi, upaya untuk melakukan kudeta, dan kerusuhan yang diakibatkan masyarakat yang tidak lagi simpati terhadap kepemimpinan Macchi.⁵

⁵ Laporan tahunan Paraguay Kedubes RI 2002, hal.102.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik suatu pokok permasalahan yaitu: **“Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya krisis legitimasi di Paraguay era Presiden Luis Angel Gonzales Macchi (Internal dan Eksternal)?”**

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan masalah diatas, penulis menggunakan konsep pemilu, konflik, dan kekerasan. Selain itu juga akan digunakan konsep legitimasi.

1. Konsep Pemilu, Konflik, dan Kekerasan

Pemilu merupakan pemilihan yang dilakukan secara umum untuk menentukan seseorang yang akan memimpin dalam suatu wilayah. Pemilihan umum dapat berjalan secara demokratis apabila pemimpin yang ada sebelumnya atau yang sedang berkuasa tidak bersikap otoriter.⁶ Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana yang sangat penting bagi terselenggaranya sebuah sistem politik yang demokratis. Pemilu adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat atau wakil mereka dan memutuskan apa yang mereka inginkan dari pemerintah hasil pilihannya.⁷

Pemilu dianggap sebagai perwujudan dari berbagai aspirasi yang dimiliki masyarakat sehingga pemilu digunakan sebagai cara memenuhi kepentingannya

⁶ Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 1995, hal.7.

⁷ H.G. Warren, *Our Democracy at Work*, Prentice-Hall Inc , New Jersey, 1963, hal.67.

baik dalam fungsi hak individu maupun kelompok. Pemilu merupakan sarana yang disediakan agar rakyat menggunakan hak politiknya untuk memberi kontribusi penting bagi tersusunnya suatu kekuasaan negara yang demokratis.

Menurut Horowitz, konflik terjadi karena adanya keinginan untuk menguasai negara atau kelompok itu sendiri. Suatu kelompok berusaha menguasai sesuatu agar dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya, yang biasanya dilakukan dengan cara merugikan atau merusak kelompok pesaingnya.⁸ Macchi terpilih bukan berdasarkan pemilu namun dipilih oleh sidang luar biasa kongres. Hal ini membuat masyarakat Paraguay tidak sepenuhnya mendukung keberadaan Macchi. Seseorang yang dapat memenangkan pemilu akan memiliki legitimasi memegang kekuasaan. Hal tersebut membuat para calon yang ada berkompetisi untuk memenangkan pemilu. Sayangnya, tidak semua calon melakukan cara yang baik untuk memenangkan pemilu. Antar calon terkadang saling menjatuhkan untuk meraih simpati pemilih dan juga menekan pihak lawannya untuk memenangkan pemilu.

Orang yang memenangkan pemilu tentu saja akan memperoleh penguasaan negara. Kelompok oposisi yang ada di Paraguay tidak mendukung keberadaan Macchi sehingga terdapat konflik internal dalam pemerintahan Paraguay. Tidak terdapatnya dukungan dari oposisi membuat Macchi mengalami kesulitan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik.

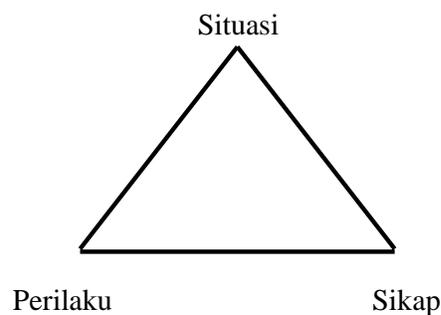
Konflik atas penguasaan negara, seringkali dipandang sebagai “*zero sum conflict*” atau juga disebut sebagai konflik habis-habisan yang maksudnya

⁸ F.A. Salam, *Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik*, Erlangga, Jakarta, 1994, hal.188.

kemenangan suatu kelompok berarti kekalahan kelompok lainnya. Perilaku konflik meliputi tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak dalam berbagai situasi konflik yang ditujukan pada pihak lawan, dengan maksud antara lain membuat pihak lawan mengubah tujuannya, melakukan tindakan yang telah dilakukan pihak lawan.⁹

Segi tiga konflik Galtung menunjukkan hubungan saling mempengaruhi antara situasi, sikap dan perilaku konflik. Galtung memandang konflik sebagai sebuah segi tiga sama sisi dengan elemen perilaku, sikap, dan situasi pada puncak-puncaknya. Perilaku merupakan aktivitas yang dimunculkan manusia karena digerakkan oleh keinginannya. Sikap adalah respon setuju atau tidak setuju terhadap objek sikap. Situasi merupakan kondisi lingkungan yang ada.¹⁰

Gambar 1. Segi Tiga Konflik Galtung



Sumber: Mitchell, C.R., *The Structure of International Conflict*, Macmillan, London, 1981, hal.318.

Situasi konflik adalah ketidakselarasan tujuan, kebutuhan, dan kepentingan berbagai pihak. Perilaku konflik dipengaruhi baik oleh situasi konflik maupun

⁹ C.R, Mitchell, *The Structure of International Conflict*, Macmillan, London, 1981, hal.318.

¹⁰ *Ibid.*

sikap pihak-pihak yang bertikai. Adapun sumber-sumber konflik adalah struktur sosial, kelangkaan, kompetisi, dan perubahan. Struktur sosial merupakan tingkatan sosial yang ingin diperebutkan, kelangkaan adalah segala sesuatu yang sangat terbatas jumlahnya, kompetisi merupakan persaingan untuk mendapat sesuatu yang sama-sama diinginkan, sedangkan perubahan adalah pergeseran nilai-nilai yang ada.¹¹

Lebih lanjut, Janie menjelaskan bahwa jika untuk menyelesaikan ketidakselarasan tujuan, kebutuhan, maupun kepentingan melalui mekanisme-mekanisme *prevention* tidak dicoba atau gagal, hubungan antara pihak-pihak akan memburuk. Memburuknya hubungan tersebut dapat dikembangkan menjadi penggunaan ancaman maupun tindakan-tindakan koersif.¹²

Horowitz juga menjelaskan penggunaan kekerasan sering dilakukan dalam suatu konflik. Akibat dari adanya konflik yaitu ada pihak yang mengalami kekerasan, dan dapat dialami oleh salah satu pihak atau keduanya. Ketika kekerasan terjadi, maka kelompok yang mengalami tindak kekerasan akan mencari perlindungan pada penguasa yang ada ataupun kelompok atau organisasi lain yang dianggap mampu membantu.

Kekerasan menurut Johan Galtung adalah penempatan realisasi jasmani mental aktual manusia dibawah realisasi potensialnya, secara langsung maupun tidak langsung.¹³ Kemudian Galtung membagi kekerasan menjadi kekerasan fisik, kekerasan struktural, serta kekerasan kultural. Pembahasan selanjutnya akan

¹¹ J. Leatherman, *Breaking Cycles of Violence, Conflict Prevention in Intranstate Cerisis*, Kumarian Press Inc, Connenticut, 1999, hal.44.

¹² *Ibid.* hal.44.

¹³ M. Lubis, *Menggapai Dunia Damai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hal.138.

menitikberatkan pada kekerasan fisik yang menurut Mitchel meliputi tindakan membunuh ataupun melukai manusia, serta tindakan perusakan material.

Usaha untuk mengatasi konflik dapat dilakukan dengan *light prevention* dan *deep prevention*. *Light prevention* merupakan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencegah konflik laten atau situasi konflik yang berpotensi melahirkan kekerasan menjadi konflik terbuka dengan penggunaan kekerasan tanpa harus menitikberatkan pada pengelolaan akar-akar konflik. *Light prevention* meliputi berbagai usaha, dari intervensi diplomatik, baik diplomasi resmi (seperti mediasi, konsiliasi, pembentukan tim pencari fakta, pengiriman utusan negara atau badan internasional maupun diplomasi tidak resmi (seperti mediasi pribadi, komisi-komisi perdamaian, seminar *problem solving*, dan resolusi konflik).¹⁴

Deep prevention merupakan usaha untuk membangun kapasitas domestik, regional, maupun internasional untuk mengelola akar konflik. *Deep prevention* diantaranya meliputi tindakan-tindakan untuk memperkuat atau memperbaiki pemerintahan (seperti konferensi nasional, komisi konstitusional), memonitor pemilihan umum, mendukung pemeriksaan yang handal, dan mengusahakan kebebasan media.¹⁵

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis legitimasi di Paraguay era Presiden Luis Angel Gonzales Macchi meliputi faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor internalnya karena Macchi tidak mampu mengelola konflik yang ada di dalam negaranya. *Deep prevention* yang merupakan usaha untuk

¹⁴ Miall, H., Rombbotham, O., & Woodhause, T., *Contemporary Conflict Resolution*, Polity Press, Cambridge, 1999, hal.111.

¹⁵ *Ibid*, hal.113.

membangun kapasitas domestik tidak berhasil dilakukan Machi. Faktor eksternal juga menyebabkan terjadinya krisis legitimasi di Paraguay era Macchi. Macchi juga tidak mampu mendapatkan dukungan regional maupun internasional untuk membantu Paraguay menyelesaikan akar konflik.

Penulis dalam hal ini menggunakan *deep prevention* karena Machi melakukan usaha untuk membangun kapasitas domestik, regional maupun internasional untuk mengelola akar konflik. Realitanya memang Macchi tidak menggunakan kekerasan secara militer untuk memperkuat legitimasinya. Hal ini menyebabkan *light prevention* tidak di gunakan oleh peneliti.

2. Konsep Legitimasi

Krisis politik di Paraguay disebabkan karena kurang berhasilnya Pemerintah Gonzales Macchi dalam menata kehidupan sosial ekonomi Paraguay, sehingga menyulut antipati masyarakat tertentu dengan ditandai munculnya aksi demonstrasi yang menuntut mundurnya Gonzales Macchi dari kursi kepresidenan. Selain itu tindakan berlebihan dalam menata struktur angkatan bersenjata telah membangkitkan semangat perlawanan simpatisan mantan Jendral Oviedo yang masih aktif yang akhirnya memunculkan upaya kudeta. Hal tersebut mencerminkan akan adanya krisis legitimasi dalam pemerintahan Gonzales Macchi. Legitimasi merupakan salah satu elemen penting dalam politik. Sementara krisis dapat menyebabkan hilangnya legitimasi lembaga pemerintahan

dikarenakan krisis mengancam integrasi sosial dan merusak berbagai *resources* yang dibutuhkan negara¹⁶.

Legitimasi merupakan pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan kekuasaan politik dan hanya masyarakat saja yang dapat memberikan legitimasi pada kewenangan pemimpin yang memerintah, sementara pihak yang memerintah tidak dapat memberikan legitimasi atas kewenangannya¹⁷. Legitimasi merupakan *output* yang lahir dari komunitas sosial meliputi kepercayaan sosial (*social trust*) dan solidaritas. Pengakuan yang lahir dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan *input*, masukan dari fungsi yang dimainkan sendiri oleh pemerintah sebagai penjamin tercapainya tujuan dari sistem masyarakat. Keberadaan negara diakui sejauh memberikan sumbangan positif bagi perlindungan hak-hak ekonomi warga dalam memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, bila tidak mampu melindungi pengakuan dan kepercayaan itu akan luntur.

Dalam konteks ini bagaimanapun juga negara tidak dapat terlepas dari perannya terhadap ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi persoalan pengakuan politik dari masyarakat. Begitupun sebaliknya krisis ekonomi yang akan terjadi pun akan menjadi krisis politik. Keadaan ini pada gilirannya akan memaksa negara untuk menghimpun berbagai *resources* dari sistem sosial budaya untuk memulihkan keseimbangan fungsi. Akan tetapi karena krisis politik itu sekali lagi mencerminkan konflik kepentingan mendasar dalam masyarakat kelas, maka

¹⁶ J. Habermas, *Krisis Legitimasi*, CV. Qalam, Yogyakarta, 2004, hal.3.

¹⁷ R. Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 1992, hal.99.

mustahil menyelesaikan persoalan ini langsung melalui mekanisme integrasi sosial. Hal ini menyebabkan negara semakin kesulitan menjustifikasi kebijakan-kebijakannya. Kesulitan inilah yang kemudian menciptakan defisit legitimasi¹⁸.

Legitimasi sangat penting bagi pemimpin pemerintahan, hal ini karena legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan kemungkinan perubahan sosial. Pengakuan dan dukungan masyarakat dan pihak yang berwenang akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat umum¹⁹. Dalam situasi yang sulit dan pelik, pemerintah yang memiliki legitimasi dari masyarakat akan lebih dapat menyelesaikan permasalahan dari pada pemerintah yang kurang mendapat legitimasi. Legitimasi juga akan membuka kesempatan yang semakin luas bagi pemerintah untuk tidak hanya ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.

Pemerintah dapat mengklaim kewenangan dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kewenangannya sah. Namun demikian, hanya masyarakat yang dipimpin yang menentukan apakah kewenangan itu berlegitimasi atau tidak. Jadi legitimasi terkait dengan apakah rakyat menerima atau tidak hak moral dari pemimpin politik untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat atas mereka. Apabila rakyat menerima dan bersedia terkait dengan keputusan-keputusan yang dibuat, maka pemimpin tersebut tidak dapat dikatakan tidak sah.²⁰ Dengan demikian golongan yang berkuasa tidak mungkin bertahan terus tanpa

¹⁸ J. Habermas, *Krisis Legitimasi*, op.cit., hal.5.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ C. F. Andrian, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal.102.

didukung oleh masyarakat (tanpa adanya legitimasi dari rakyat). Untuk itu golongan tersebut senantiasa berusaha untuk membenarkan kekuasaannya terhadap masyarakat agar dapat diterima sebagai kekuasaan yang legal dan baik untuk dijalankan.

Agar seseorang mendapat pengakuan dan kepercayaan (legitimasi) dari masyarakat untuk menjadi pemimpin maka ia harus terlebih dahulu menunjukkan kualitas kepemimpinannya terhadap masyarakat. Kekuasaan yang dijalankan oleh suatu rezim atau pemerintahan hanya akan berjalan efektif dan berlangsung lama jika itu didasarkan oleh suatu keharmonisan. Max menambahkan *Harmonious relationship between the ruler and the ruled is that in which the ruled accept the rightness of the rule's superior power.*²¹ Indikator dari menurunnya legitimasi seorang pemimpin dapat dilihat dari semakin banyaknya pihak yang menentang keberadaan pemimpin tersebut. Penentangan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain adalah kritikan, tidak mendukung kebijakan yang dibuat pemimpin, serta demonstrasi.

Gonzales Macchi merupakan pemimpin yang pada awal naiknya menjadi presiden Paraguay mendapat dukungan dari rakyat. Rakyat Paraguay berharap Macchi dapat membawa Paraguay untuk keluar dari krisis yang terjadi. Ketika mengambil alih kekuasaan pada tahun 1999, Paraguay dihadapkan pada masalah krisis politik dan krisis ekonomi yang tidak kunjung usai. Gonzales Macchi dipercaya mampu mengatasi berbagai kesulitan tersebut.

²¹ M. Hudson, *Arab Politics: The Search for Legitimacy*, Yale University Press, New Haven and London, 1997, hal.1.

Suatu sistem politik dapat berjalan dengan baik apabila keseluruhan dari sistem tersebut mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. Legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga unsur-unsur sistem politik yang lain. Objek legitimasi bukan hanya pemerintah, tetapi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik. Jadi legitimasi dalam arti luas berarti dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit merupakan dukungan masyarakat terhadap yang berwenang. Rendahnya legitimasi suatu pemerintahan juga dapat disebabkan ketidakefektifan pemerintah, yang pada kenyataannya dihadapkan pada tantangan sosial, ekonomi dan politik yang tidak ringan.

Pengakuan dan dukungan yang memudar disebut krisis legitimasi²². Krisis legitimasi tidak selalu berakhir dengan kejatuhan dan pergantian pihak yang berwenang. Hal tersebut tergantung dari kemampuan pihak yang berwenang untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan yang terjadi dan mendapatkan kembali pengakuan dan dukungan dari masyarakat.

Menurut Lucyan Pye, ada empat sebab terjadinya krisis legitimasi yaitu :²³

1. Prinsip kewenangan beralih pada prinsip kewenangan yang lain. Artinya, prinsip kewenangan yang selama ini di gunakan tidak lagi diakui masyarakat, dan masyarakat sudah menemukan prinsip kewenangan lain yang dianggap lebih baik sehingga pemerintah yang mendasarkan diri pada prinsip kewenangan lama akan kehilangan dukungan.

²² R. Surbakti, Op.cit., hal.99.

²³ L. W. Pye, *The Legitimacy Crisis*, dalam Leonard Binder.et.al. *Crises n Sequences in Political Development*, Princeton University Press, Princeton, hal.138-147.

2. Persaingan yang sangat tajam dan tidak sehat serta disalurkan melalui prosedur yang tidak seharusnya diantara para pemimpin pemerintahan sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh pemerintahan. Perpecahan semacam ini menimbulkan kelumpuhan pemerintah sehingga masyarakat tidak akan mentaati kewenangan yang ada.
3. Pemerintah tidak mampu memenuhi janjinya untuk menciptakan kestabilan politik dan pelaksanaan pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan masyarakat. Kekecewaan tersebut berakibat memudarnya dukungan kepada pemerintah.
4. Perubahan aturan yang kurang di sosialisasikan. Adanya suatu perubahan aturan apabila tidak disosialisasikan secara baik dapat menyebabkan masyarakat tidak menyukai pemerintah yang membuat aturan tersebut. Kondisi ini apabila terus berlangsung dapat menyebabkan pemerintah dianggap menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

Berdasarkan sebab krisis legitimasi menurut Lucyan Pye tersebut, poin 2 dan 3 berkaitan erat dengan permasalahan yang dihadapi Gonzales Macchi, krisis yang muncul dalam pemerintahan disebabkan pemerintah tidak mampu menciptakan pemerintahan yang efektif, adanya persaingan dan perseteruan di dalam tubuh pemerintahan yang terjadi justru ikut memperkuat seruan pengunduran diri presiden Gonzales Macchi dan pengunduran diri Miguel Abdon Saguier sebagai menteri luar negeri yang selanjutnya menjadi titik pangkal

keretakan kabinet Kesatuan Nasional²⁴. Adanya rongrongan dari Jenderal Lino Caesar Oviedo yang masih mempunyai simpatisan setia yang menyulut kerusuhan dan menambah permasalahan dalam pemerintahan Gonzales Macchi. Hal ini merefleksikan kegagalan Gonzales Macchi dalam menciptakan kerjasama untuk kemajuan bangsa dan negara. Keadaan ini telah digunakan lawan politiknya baik intern partai pemerintah maupun partai oposisi untuk menyudutkan Presiden Gonzales Macchi, yang terus menerus melancarkan demonstrasi untuk mendepak Presiden Gonzales Macchi dari kursi kepresidenan.

Ditambah lagi dengan ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi janji untuk menciptakan kestabilan politik dan pelaksanaan pembangunan ekonomi, adanya upaya ekstradisi pelarian Paraguay ke negara-negara tetangga memberikan kontribusi terbesar penyebab kegagalan pemerintah dalam proses perbaikan di sektor sosial ekonomi. Selain itu adanya kebijakan privatisasi ekonomi ditentang oleh rakyat, yang dikhawatirkan akan memperburuk ekonomi negara dan menambah pengangguran, semakin menambah kekecewaan rakyat akan kinerja pemerintahan Macchi. Krisis legitimasi akan semakin memburuk ketika pihak yang berwenang tidak tanggap akan perubahan sikap terhadap kewenangan dalam masyarakat. Krisis ini kerap akan berlanjut pada proses perubahan politik atau pergantian rezim. Seorang pemimpin dapat berkuasa jika memperoleh dukungan dari rakyatnya. Begitu Macchi kehilangan dukungan terhadap pemerintahannya, legitimasi Macchi harus hilang seiring dengan makin kuatnya tuntutan rakyat agar Macchi mundur.

²⁴ “Bahaya Kekerasan Masih Mengancam Paraguay”, *Op.Cit.*

E. Hipotesa

Berdasarkan kerangka dasar pemikiran di atas maka penyebab krisis legitimasi presiden Macchi di Paraguay adalah ketidakmampuan Macchi melakukan *deep prevention* baik secara internal maupun eksternal. *Deep prevention* internal diukur dari mampu atau tidaknya Macchi memenuhi janjinya untuk menciptakan kestabilan politik dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. *Deep prevention* eksternal diukur dari mampu atau tidaknya Macchi mendapatkan dukungan dari negara lain dalam melakukan upaya ekstradisi pelarian buronan Paraguay dari negara mereka.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam proses skripsi ini adalah metode deskripsi analitik, dengan mengumpulkan data dan fakta, kemudian berdasarkan kerangka konseptual disusun secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan korelasi antara fakta yang satu dengan yang lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* yang menggunakan sumber data dari buku-buku referensi, artikel-artikel, jurnal, pencarian data internet, surat kabar dan majalah-majalah.

G. Tujuan Penelitian

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dalam mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya krisis legitimasi di Paraguay era Presiden Luis Angel Gonzales Macchi.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan agar dapat dimanfaatkan mahasiswa yang sedang menempuh studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Jangkauan Penelitian

Pembatasan penilaian suatu masalah penting untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pembuatan analisis. Jangkauan penelitian untuk menyusun skripsi dibatasi sejak terpilihnya Presiden Luis Gonzales Macchi menggantikan Raul Cubas Grau tahun 1999 sampai Gonzales Macchi selesai menjabat tahun 2003. Selain itu penelitian tersebut juga mencakup kejadian di tahun-tahun sebelumnya yang masih dianggap relevan, hal ini dimaksud sebagai penunjang dan pelengkap dari bahan yang utama.

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini terbagi kedalam lima bab yang terdiri dari bab 1 hingga bab 5.

Bab I. Pendahuluan yang di dalamnya diuraikan mengenai: alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesa, metodologi penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Dinamika politik Paraguay di bawah kepemimpinan Presiden Luis Angel Gonzales Macchi. Dalam bab ini akan dijelaskan kondisi pemerintahan dan

ekonomi Paraguay, serta konflik-konflik yang ada di Paraguay di era Presiden Macchi.

Bab III. Faktor Internal yang Menyebabkan Krisis Legitimasi Macchi.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang proses terpilihnya Macchi, ketidakberhasilan Macchi melakukan *deep prevention* secara internal. Macchi tidak mampu memenuhi janjinya untuk menciptakan kestabilan politik dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang disebabkan adanya kebijakan Privatisasi Ekonomi.

Bab IV. Faktor Eksternal yang menyebabkan Krisis Legitimasi Macchi.

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Macchi yang tidak mampu melakukan hubungan baik dengan negara lain. Selain itu juga tidak adanya hubungan dekat antara Paraguay dengan organisasi internasional. Ketidakmampuan tersebut ditunjukkan upaya ekstradisi yang dilakukan Macchi mengalami kegagalan karena tidak adanya dukungan dari negara lain.

Bab V. Kesimpulan, berisi tentang kesimpulan dari penelitian, dimana kesimpulannya merupakan hasil analisis yang berasal dari hipotesa yang telah disesuaikan dengan fakta di lapangan.